

BAB I

PENDAHULUAN

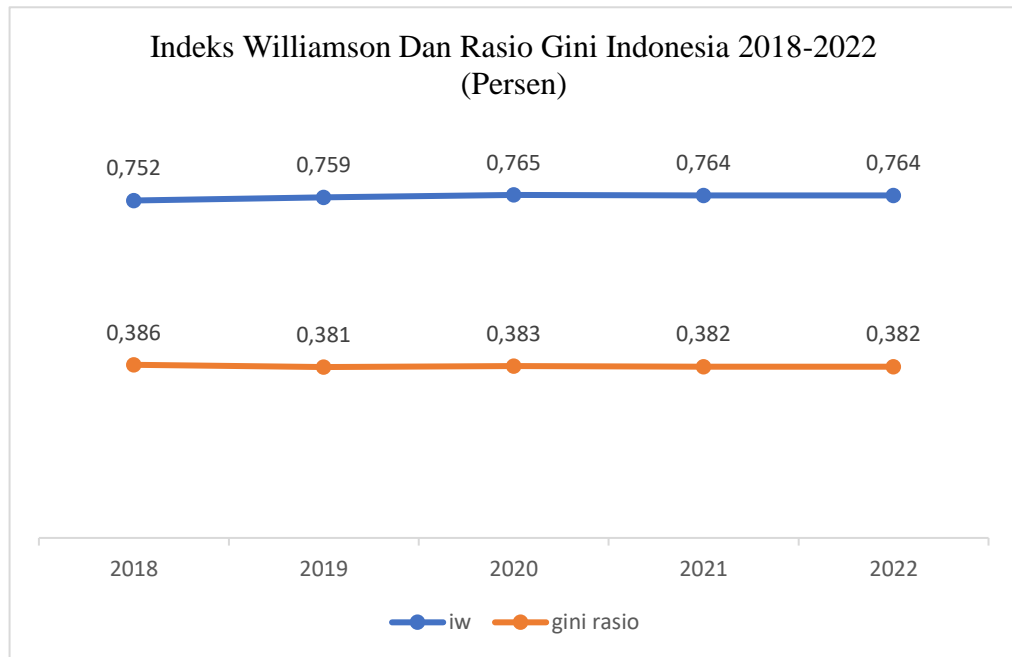
1.1 Latar Belakang

Disparitas pendapatan merupakan permasalahan penting bagi pembangunan suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu disparitas pendapatan harus segera diatasi agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan kompleks seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat perlindungan sosial. Menurut (Wijayanti P Kurniawati, 2022) Disparitas pendapatan adalah suatu keadaan dimana pendapatan antar wilayah memiliki selisih yang cukup timpang dan dalam jangka waktu yang panjang. Semakin tinggi disparitas pendapatan di suatu wilayah menunjukkan bahwa pendistribusian pendapatan belum terdistribusi secara merata di masyarakat.

Disparitas pendapatan terjadi karena pembangunan antar daerah tidak mengalami pemerataan. Tidak meratanya pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu akselerasi pembangunan dimana daerah yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak sehingga menurunkan taraf produktivitasnya, karakteristik wilayah, keadaan geografis, SDA, SDM, sosial, dan budaya, dikarenakan pengaruh dari karakteristik wilayah terhadap pembentukan pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut adalah fenomena yang biasa terjadi di setiap wilayah. Kejadian fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyebab, termasuk perbedaan dalam sumber daya alam, infrastruktur, investasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah. (Tiffany,

2022). Kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia sangat tinggi. (Nasution, 2020).

Grafik 1.1
Indeks Williamson Dan Rasio Gini Indonesia 2018-2022



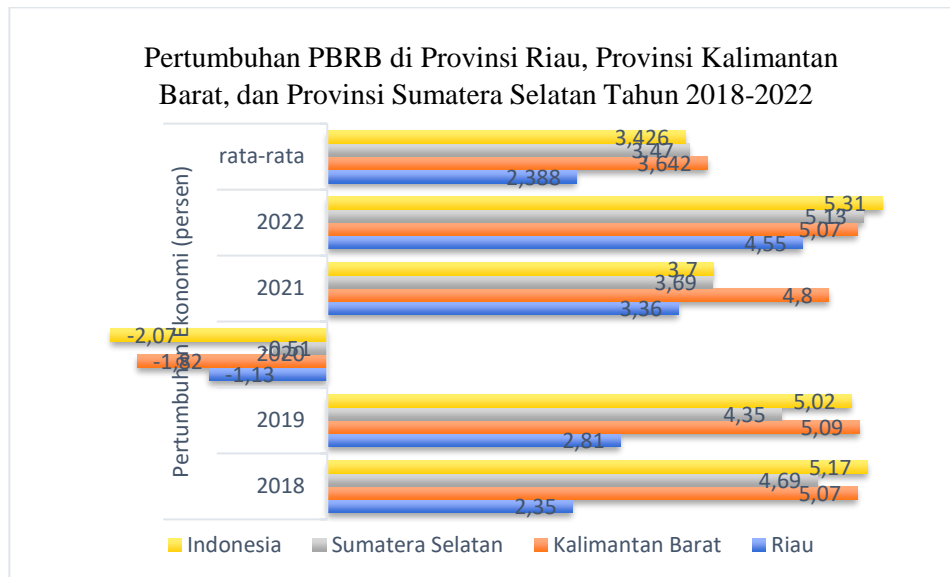
Sumber: BPS pusat, data diolah 2023

Berdasarkan grafik di atas nilai ketimpangan di Indonesia yang diukur menggunakan indeks williamson berada dikisaran 0,752 - 0,764 hampir mendekati angka 1, artinya Indonesia berada pada kondisi ketimpangan wilayah yang tinggi. Sedangkan ketimpangan di Indonesia jika dilihat dari nilai rasio gini memiliki nilai dikisaran 0,381 - 0,392 artinya ketimpangan di Indonesia termasuk kedalam kategori sedang dimana dalam penyebaran pendapatan sudah disebarakan secara merata. Meskipun demikian, ketimpangan pembangunan wilayah masih belum menunjukkan hasil yang sama.

Indonesia memiliki beberapa provinsi dengan karakteristik keunggulan komoditas sektor yang sama ini termasuk Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Ketiga provinsi tersebut memiliki keunggulan komoditas sektor perkebunan. Komoditas yang paling unggul adalah kelapa sawit, lebih dari 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlokasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan sekitar 95% dari minyak mentah kelapa sawit diproduksi di wilayah tersebut. Kelapa sawit memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional, memajukan perekonomian rakyat, menarik tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Laili, 2018).

Pembangunan suatu daerah dapat diukur menggunakan pertumbuhan ekonomi domestik. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berjalan secara erat, terutama karena kemampuan pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat dan mampu mendorong peningkatan produksi baik barang maupun jasa. Terdapat satu pokok penting dalam mendukung aktivitas perekonomian, pokok tersebut adalah tersedianya infrastruktur. Infrastruktur dikatakan mempunyai kemampuan untuk dalam memberikan dorongan antar sektor agar lebih berkembang, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan mendorong kegiatan produktif yang secara langsung maupun tidak langsung mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Purim and Krismanti, 2021).

Grafik 1.2
Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat,
dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS pusat, data diolah 2023

Provinsi Kalimantan Barat adalah penyumbang produksi kelapa sawit terbesar berikutnya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,44 juta hektar pada tahun 2022 lebih luas dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1,16 juta hektar, luas tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jumlah produksi kelapa sawit tahun 2021 mencapai 5,6 juta ton atau sebesar 12,21% dari total produksi di Indonesia. Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat tumbuh 5,07% pada 2018 dan 5,09% pada 2019. Namun, pada tahun 2020, saat terjadinya awal adanya virus COVID-19, terjadi penyusutan pada tingkat pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 1,82% dan pada tahun 2021, terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,78% dan pada tahun 2022 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi yang Provinsi Kalimantan Barat mampu menduduki nilai di atas rata-rata nasional. Besarnya Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari adanya lahan untuk sektor

perkebunan terutama pada komoditas perkebunan kelapa sawit sehingga mampu menghasilkan produk kelapa sawit yang cukup besar sehingga mampu mendorong perekonomian nasional dan perekonomian daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2022)

Sumatera Selatan turut serta sebagai kontributor signifikan bagi Indonesia sebagai penyumbang produk kelapa sawit terbesar selanjutnya setelah Kalimantan Barat. lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera seluas 1,22 juta hektar pada tahun 2022, naik dari 1,21 juta hektar pada tahun 2020. Total produksi sawit pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,5% atau sekitar 3 juta ton dari total produksi di Indonesia. Struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka tersebut mencapai 4,69%, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,35%. Pada tahun 2020, meskipun terjadi trend penurunan, namun tidak sebesar Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebesar -0,51%. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi peningkatan positif sebesar 3,69% dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 5,13%. Meskipun berfluktuasi namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan adanya perkebunan kelapa sawit mampu berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional maupun perekonomian daerahnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

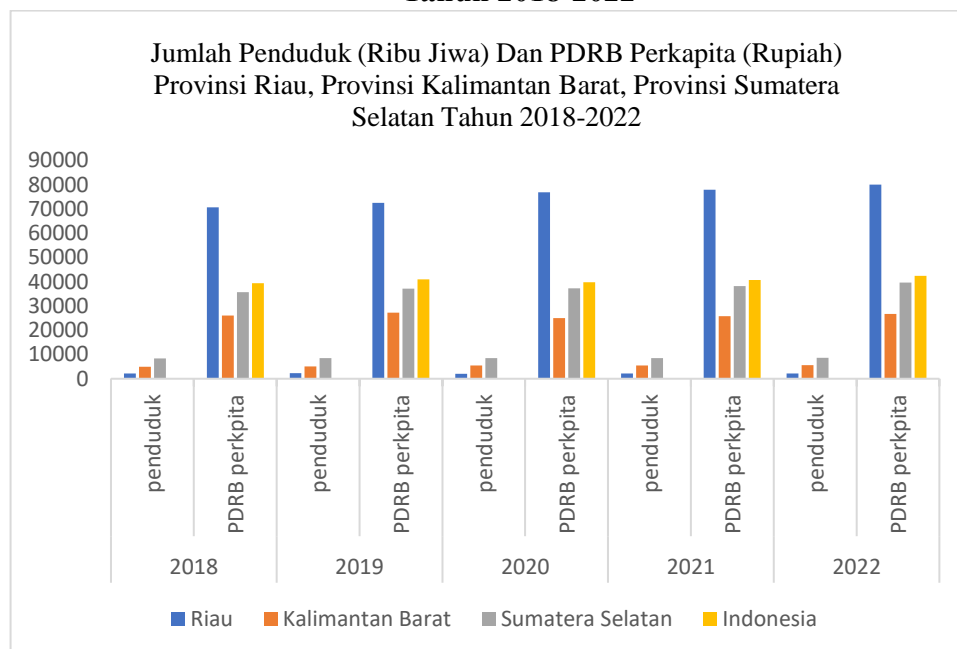
Untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan ekonomi, tidak hanya diperlukan indikator pertumbuhan ekonomi, melainkan juga perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan. Salah satu cara mencapai

pembangunan ekonomi di daerah adalah melalui peningkatan pendapatan per kapita. Kenaikan tersebut mencerminkan penambahan nilai pada pendapatan masyarakat dan kemunculan kesejahteraan di kalangan mereka. Pembangunan ekonomi dikatakan terwujud jika pendapatan perkapita terus meningkat dengan laju yang relatif cepat. Besarnya pendapatan perkapita juga berhubungan erat dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut. Untuk mengukur sejauh mana kemakmuran perekonomian penduduk yang ada di suatu negara dan performa ekonomi secara keseluruhan maka diperlukan sebuah alat ukur. Alat ukur yang digunakan secara umum dan dijadikan sebagai indikator penting adalah pendapatan per kapita. Walaupun demikian, pembangunan ekonomi sebaiknya jangan hanya fokus pada peningkatan pendapatan per kapita semata, hal tersebut juga perlu mempertimbangkan proses pemerataan jumlah uang yang relevan di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi suatu wilayah akan dikatakan berhasil jika pendapatan perkapita meningkat dan pada saat yang sama disparitas pendapatan menurun (Hadi, 2017).

PDRB per kapita adalah ukuran yang dijadikan sebagai bahan evaluasi kesejahteraan perekonomian masyarakat di suatu wilayah atau negara. PDRB perkapitan adalah hasil dari keseluruhan nilai yang diperoleh dari barang dan jasa yang telah dihasilkan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu wilayah. Ketika jumlah penduduk suatu wilayah meningkat, PDRB per kapita cenderung menurun, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena meskipun PDRB wilayah tersebut mungkin meningkat, peningkatan tersebut harus dibagi dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan nilai per

kapita menjadi lebih kecil. Dalam kasus Provinsi Riau, sebagai provinsi penghasil produk kepala sawit tertinggi di Indonesia, menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti SDA, industri ekonomi lokal, dan infrastruktur.

Grafik 1.3
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) Dan PDRB Perkapita (Rupiah)
Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS pusat, data diolah 2023

Berdasarkan grafik di atas, dari ketiga provinsi tersebut mempunyai PDRB perkapita yang berbeda-beda dan mempunyai selisih yang relatif timpang. Di Indonesia, Provinsi Riau sebagai penghasil kelapa sawit terbesar dan memiliki pendapatan perkapita tertinggi dari Provinsi Kalimantan barat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan grafik 1.3 PDRB perkapita Provinsi Riau mengalami peningkatan di setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar Rp. 70.736,00 dan pada

tahun 2022 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp. 80.057,00 dan berada di atas rata-rata PDRB perkapita nasional. Besarnya PDRB perkapita tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Diantara ketiga provinsi tersebut Provinsi Riau memiliki penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 2179 ribu jiwa (BPS Pusat, 2022).

PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai terkecil dari tingkat yang dimiliki Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018-2022 PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat berada di angka Rp. 26.000,00 tetapi terus meningkat yang relatif kecil di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan PDRB dan juga jumlah penduduk, total jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 5541 ribu jiwa (BPS Pusat, 2022).

PDRB perkapita Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat yang relatif besar disetiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar Rp. 35.659,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 39.676,00. Dan dari ketiga provinsi tersebut, jumlah penduduk Provinsi Sumatera selatan menduduki posisi tertinggi yaitu sebanyak 8657 ribu jiwa pada tahun 2022 (BPS Indonesia, 2022). Berdasarkan data dari grafik 1.3 mengidentifikasi bahwa pencapaian kesejahteraan ekonomi di ketiga provinsi tersebut masih belum merata dikarenakan PDRB perkapita masih memiliki selisih yang relatif tinggi. Berdasarkan pengukuran dari pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita sebagai indikator penting dalam pengukuran, dapat diketahui bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum fokus terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan pendistribusian pendapatan.

Terjadinya Disparitas pendapatan tidak lepas dari permasalahan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan infrastruktur

TIK. Menurut Todaro & Smith dalam (Dewi *et al.*, 2022) teknologi mampu berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, TIK juga berkontribusi penting dalam pertukaran dan perluasan informasi terkhusus di daerah-daerah. Sehingga, peran TIK menjadi krusial bagi suatu daerah yang sedang melakukan pembangunan serta menurunkan keterbelakangan dengan wilayah lainnya.

Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan yang dapat kita rasakan. Beragam kenyamanan dan kemudahan, seperti mendapatkan informasi melalui ponsel dan internet, serta kelancaran bertransaksi, hal tersebut merupakan hasil positif dari perkembangan teknologi informasi ini. Perkembangan tersebut mendorong munculnya suatu gaya hidup baru yang disebut sebagai *e-life*, yang menunjukkan bahwa kehidupan sekarang telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan elektronik dari awal hingga akhir. Saat ini, berbagai konsep berbasis elektronika, seperti adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*), pemerintahan elektronik (*e-government*), pendidikan elektronik (*e-education*), perpustakaan elektronik (*e-library*), jurnal elektronik (*e-journal*), layanan kesehatan elektronik (*e-medicine*), laboratorium elektronik (*e-laboratory*), keanekaragaman hayati elektronik (*e-biodiversity*), dan sebagainya, tengah menjadi tren dan semakin populer.

Perkembangan teknologi, terutama dalam ranah bidang Dalam dua puluh tahun terakhir, TIK menjadi salah satu tren dalam era saat ini, fenomena tersebut telah mengalami transformasi menjadi digital ekonomi. Hal ini membuat pertumbuhan *smart city* di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam mendorong perekonomian suatu kota, bahkan tingkat nasional. Digital ekonomi

juga memiliki peran yang signifikan dalam masa Revolusi Industri 4.0, di mana alat komunikasi tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga menjadi sumber utama keuntungan bagi perekonomian. Dampak dari revolusi industri 4.0 melalui pertumbuhan ekonomi digital tercermin dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia percaya bahwa ekonomi digital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan bersaing pada produk dan layanan, baik dalam skala besar maupun kecil. Pertumbuhan digital ekonomi juga memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia, dapat dilihat dari dominasi valuasi perusahaan yang mengalami pergeseran dari sektor energi atau minyak pada awal tahun 2016 beralih menjadi dominasi perusahaan yang berfokus pada teknologi terbarukan. (Badriah, 2019).

Dalam pandangan Menteri PPN RI dan Bappenas, pengembangan Revolusi Industri 4.0 yang dilakukan dengan tepat dapat menyumbang secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasi mencapai kisaran 6%-7% pada tahun 2030. Dengan adanya program *Making Indonesia 4.0* diyakini mampu memberikan tambahan sekitar 1%-2% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun, dibandingkan dengan baseline periode 2018-2030 yang sebesar 5%, sehingga mencapai kisaran 6%-7%. Efisiensi dalam kegiatan ekonomi, didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur yang lebih besar, diidentifikasi sebagai penyebab utama. Dari segi penciptaan lapangan kerja, Bappenas memproyeksikan potensi penambahan sekitar 10 juta lapangan pekerjaan dibandingkan dengan baseline hingga tahun 2020, meningkat dari 20 juta menjadi 30 juta dengan penerapan industri 4.0. (Brodjonegoro, B.P.S. dalam (Badriah, 2019)).

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, sektor industri kelapa sawit perlu segera melakukan peningkatan, terutama dalam penerapan teknologi digital. Ini menjadi krusial karena penguasaan teknologi digital dianggap sebagai faktor utama yang akan menentukan daya saing Indonesia. Revolusi Industri 4.0, melalui adopsi inovasi dan teknologi, memegang peran penting dalam meningkatkan tingkat produktivitas dan mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan perkapita. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor Kelapa Sawit dianggap sebagai langkah yang penting untuk memanfaatkan potensi dan meraih keunggulan dalam era industri yang semakin terdigitalisasi. Penerapan teknologi di sektor industri, termasuk industri kelapa sawit, menjadi kunci untuk memperkuat keberlanjutan dan efisiensi operasional. Industri kelapa sawit global, termasuk di Indonesia, perlu segera melakukan pembenahan. Terutama, peningkatan efisiensi proses dan operasional menjadi langkah penting yang harus diambil, terutama dalam aktivitas yang melibatkan banyak pekerja, seperti merawat tanaman, merawat lahan, memberi pupuk, membersihkan gulma, panen, transportasi buah, sampai pada penimbangan dan pengurutan. Hal ini menjadi penting mengingat adanya potensi inefisiensi waktu dan biaya di sektor ini. Dengan menerapkan teknologi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam setiap tahapan kegiatan lapangan, mengurangi biaya, dan mempercepat proses secara keseluruhan. Langkah-langkah ini tidak hanya dapat mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit, tetapi juga meningkatkan daya saing secara global (Haryanti, Marsono and Sona, 2021).

Menurut (Das and Drine, 2020) TIK dapat mengurangi disparitas pendapatan antar kelompok dalam masyarakat, terutama melalui pembukaan

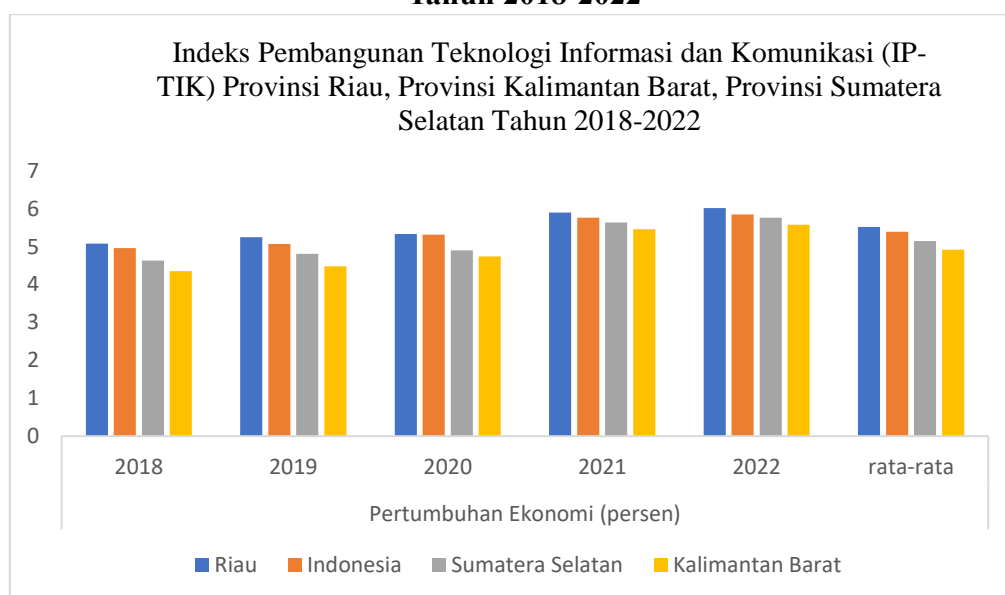
peluang baru untuk pertumbuhan pendapatan dan peningkatan akses terhadap pengetahuan dengan adanya penyebaran TIK juga mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Namun menurut (Harry Patria and Azeez Erumban, 2020) Adanya tren kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan memberikan dampak ketimpangan disebabkan oleh fakta bahwa manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh individu dengan pendapatan tinggi dan perusahaan yang besar.

Dalam beberapa periode sepuluh tahun terakhir, perkembangan TIK telah mempercepat pertumbuhan industri, meningkatkan optimalisasi dalam administrasi pemerintahan dan kegiatan bisnis, serta membentuk dasar yang krusial untuk perekonomian berbasis teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki kemampuan mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas, seperti meningkatkan akses dengan lebih cepat terhadap informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi, serta membuat keputusan berdasarkan informasi. Berdasarkan pendekatan yang diterapkan dari *International Telecommunication Union* (ITU), BPS menyusun indeks yang mencerminkan perkembangan TIK di Indonesia, dikenal sebagai Indeks Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 yang mana semakin besar angkanya mencerminkan kemajuan dalam pembangunan TIK yang lebih baik di suatu wilayah. (BPS PUSAT, 2023).

Memanfaatkan TIK dengan baik merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Menggencarkan pemanfaatan teknologi di daerah dan pusat industri serta kemajuan TIK juga harus dipadukan dengan kearifan lokal daerah sehingga dapat mempersempit kesenjangan antar daerah.

Pemanfaatan teknologi dapat berkontribusi pada transformasi ekonomi dengan menciptakan sektor lapangan kerja baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dan dengan mampu meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga diharapkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang bersifat inklusif (Dewi *et al.*, 2022). Kehadiran teknologi membawa harapan baru bagi kemajuan perekonomian, salah satunya dalam mengatasi disparitas pendapatan.

Grafik 1.2
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS pusat, data diolah 2023

Berdasarkan grafik 1.2, tingginya nilai IP-TIK sejalan dengan besarnya PDRB perkapita. Dari ketiga provinsi tersebut, rata-rata IP-TIK masih Dari ketiga provinsi tersebut, hanya Provinsi Riau memiliki nilai IP-TIK diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,516%. Adanya perbedaan nilai IP-TIK di ke tiga wilayah tersebut mengartikan bahwa ada kesenjangan pembangunan. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan berturut-turut memiliki nilai IP-TIK sebesar 4,922% dan 5,148%, angka tersebut kurang dari

angka rata-rata indeks nasional yaitu besar 5,392%, namun nilai tersebut berada pada katagori pembangunan TIK sedang. Besarnya nilai IP-TIK di ketiga provinsi tersebut terus meningkat disetiap tahunnya. Artinya perbaikan terhadap infrastruktur TIK terus berjalan di ketiga provinsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas wilayah di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan memiliki perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IP-TIK). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan tidak sejalan dengan besarnya PDRB perkapita dan nilai IP-TIK. Provinsi Riau menduduki posisi terbawah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama lima periode terakhir, tetapi nilai PDRB perkapita dan IP-TIK tertinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan rata-rata nasional. Keadaan infrastruktur TIK yang kurang kompeten di tiap daerah nantinya akan menghalangi produktivitas output terhadap PDRB perkapita di ketiga Provinsi

Disparitas pembangunan merupakan sebuah ironi yang sering muncul seiring dengan semakin cepatnya laju pembangunan. Istilah ini merujuk pada ketidakmerataan atau ketimpangan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antar wilayah dalam suatu negara. Meskipun kemajuan teknologi dan globalisasi telah menciptakan banyak peluang baru, tidak semua daerah dapat memanfaatkannya secara optimal. Beberapa wilayah mengalami perkembangan yang pesat, sementara daerah lain masih tertinggal, menghadapi masalah kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Fenomena ini menyebabkan berbagai masalah rumit yang

mebutuhkan perhatian khusus. Konflik sosial, perpindahan besar-besaran ke kota-kota besar, melemahkan kohesi nasional, dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang tertinggal dapat disebabkan oleh ketimpangan pembangunan. Sangat penting untuk memahami dasar masalah ini, mengetahui apa yang menyebabkan ketimpangan, dan membuat rencana yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan keanekaragaman geografis dan budaya yang luar biasa di Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan, disparitas pembangunan menjadi masalah yang lebih kompleks. Kabupaten/kota di ketiga wilayah tersebut mungkin mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dengan infrastruktur modern dan banyak peluang kerja, sementara beberapa kabupaten/kota yang lebih terbelakang masih menghadapi masalah dengan akses dan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan uraian diatas terkait fenomena disparitas pembangunan wilayah antar Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya strategi pembangunan wilayah yang lebih baik. Sebagai strategi untuk pembangunan wilayah yang lebih baik, untuk itu pentingnya pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan jumlah penduduk, komoditas kelapa sawit, dan infrastruktur TIK agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran penulis tersebut, maka peneliti menyusun penelitiannya dengan judul “**Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Disparitas Pendapatan Antara Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Provinsi Sumatera Selatan**” agar diperoleh hasil

mengenai kondisi struktur ekonomi, disparitas pendapatan dan kontribusi teknologi terhadap disparitas pendapatan di ketiga provinsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merinci latar belakang, diperoleh perumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan struktur perekonomian antara Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana disparitas pendapatan antara Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk mengidentifikasi struktur perekonomian di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk menganalisis dampak TIK terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penelitian yang dilakukan akan fokus terhadap situasi distribusi pendapatan yang sedang berlangsung di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan tanpa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan atau strategi yang diterapkan dalam menurunkan disparitas pendapatan antar wilayah dan kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat dalam menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Kombinasi dari analisis Tipologi Klassen, analisis Indeks Williamson, dan analisis regresi logistik biner yang akan memberikan gambaran bagaimana kondisi perekonomian, tingkat disparitas pendapatan, dan kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menurunkan disparitas di wilayah tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan dari penulisan bahwa peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai kondisi disparitas pendapatan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengkajian untuk mengevaluasi pembangunan di Indonesia terutama dalam hal ketimpangan pembangunan yang mengarah kepada tendensi *divergence* dan *covergence* serta mampu memberikan masukan kepada Bappenas dan Bappeda untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan kontribusi pada pengembangan ilmiah untuk penelitian serupa dikemudian hari.